

## Pancasila dalam Dinamika Politik Identitas di Masyarakat Dayak



Valentino Lafdy

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Corresponding Author : Valentino Lafdy, E-mail : [valdy1202@gmail.com](mailto:valdy1202@gmail.com)

### ARTICLE INFO

Received: 2021-07-21

Accepted: 2021-09-18

Volume: 1

Issue: 2

DOI: <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v1i2.678>

### ABSTRACT

*The research discussed in this scholarly work focuses on identity politics that has plagued the Indonesian nation due to abuses. The politics of abuse must be countered with the foundations contained in Pancasila, so that identity politics does not occur. For this, the method used is a quantitative research method. With this method, the author can describe Pancasila and identity politics with the data obtained, so that the reader can understand and reflect that unity is very important for this country. Therefore, this study will produce an outcome, which is to reverse identity politics into unity in social diversity or commonly known as tolerance to reconcile Indonesia and promote the prosperity of the community. advanced and growing Dayak coin. In West Kalimantan, the Dayak people were the first to seize the opportunity to openly organize along ethnic lines and pursue ethnic political goals. Immediately after the fall of the New Order, the Dayak people took to the streets demanding the appointment of Dayak police chiefs in two districts. This chapter examines the role of the Reformation, or post-New Order reform period, in Dayak politics and how Dayak politics has evolved since then. To understand the early development of Dayak politics in West Kalimantan, we will first look at how West Kalimantan experienced political transitions and intense Dayak political lobbying, including the government and other reactions from the large ethnic group, the Malays.*

### KEYWORDS

Dayak, Identity Politic, Pancasila, Society

## 1. PENDAHULUAN

Pengaruh politik identitas Pancasila dalam masyarakat Dayak merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Masyarakat Dayak, salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia, memiliki sejarah dan budaya yang kaya serta unik. Namun, dalam ranah politik, mereka sering kali menghadapi tantangan yang muncul dari perbedaan pandangan dan praktik dibandingkan dengan masyarakat lainnya di Indonesia. Masyarakat Dayak memiliki identitas yang kuat dan berbeda dari kelompok etnis lainnya.[1] Dalam hal ini, identitas Pancasila memiliki peran yang signifikan dalam membentuk identitas nasional di Indonesia, berfungsi sebagai perekat yang menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada. Pentingnya identitas Pancasila terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan masyarakat yang berbeda, termasuk masyarakat Dayak, sehingga tercipta harmoni dan persatuan di tengah keberagaman. Melalui Pancasila, nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keadilan sosial dapat diimplementasikan, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan stabilitas politik di Indonesia.[2]

Identitas Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk identitas nasional di Indonesia, dan masyarakat Dayak merupakan salah satu kelompok etnis yang paling terpengaruh oleh ini. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, menyediakan landasan yang kokoh untuk mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat yang berbeda di Indonesia. Pancasila dengan lima sila fundamentalnya — Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia — berfungsi sebagai perekat sosial yang menjembatani perbedaan suku, agama, ras, dan budaya di negeri ini.[3]

### ***Pancasila dalam Dinamika Politik Identitas di Masyarakat Dayak***

Masyarakat Dayak, yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya serta identitas yang kuat dan berbeda, sering kali dihadapkan pada tantangan dalam hal pandangan dan praktik politik yang berbeda dari kelompok etnis lainnya di Indonesia. Namun, dengan adanya identitas Pancasila, masyarakat Dayak memperoleh kerangka nilai yang universal dan inklusif yang mampu menyatukan mereka dengan kelompok-kelompok lain di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya kebersamaan, toleransi, dan keadilan sosial. [4]

Dalam konteks ini, masyarakat Dayak yang kental dengan nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadatnya, dapat menemukan titik temu dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan kepercayaan tradisional mereka, sementara nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mencerminkan penghargaan mereka terhadap hak asasi manusia dan kehidupan beradab. Persatuan Indonesia mendorong masyarakat Dayak untuk merasa sebagai bagian integral dari NKRI, sementara nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mendorong praktik demokrasi lokal yang sudah ada dalam budaya mereka. Selain itu, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan yang merata, yang sejalan dengan perjuangan masyarakat Dayak untuk memperoleh hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Dengan demikian, identitas Pancasila memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat Dayak untuk mempertahankan identitas budaya mereka sambil berintegrasi dalam kerangka negara kesatuan yang lebih besar. Ini menunjukkan bagaimana Pancasila berfungsi sebagai alat integrasi yang efektif, mengurangi potensi konflik dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia yang beragam. [5]

Penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya identitas Pancasila dalam mengintegrasikan masyarakat yang berbeda di Indonesia. Makalah penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara Pancasila, ideologi nasional Indonesia, dan politik identitas. Pancasila dipandang sebagai kekuatan pemersatu yang mendamaikan berbagai kelompok etnis, agama, dan ideologi di Indonesia. [6] Namun, politik identitas telah meningkat di era pasca-Reformasi, yang menyebabkan konflik dan fundamentalisme agama. [7] Sementara religiusitas perdamaian berbasis Pancasila secara positif memengaruhi perilaku, politik identitas masih memiliki kehadiran yang signifikan di antara orang-orang beragama di ruang publik. [8] Beberapa kelompok ekstremis menimbulkan ancaman bagi persatuan nasional dengan mencoba mengganti Pancasila dengan ideologi agama. [9] Terlepas dari tantangan ini, penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan dalam menghadapi globalisasi, dengan skor yang lebih tinggi pada nilai-nilai Pancasila berkorelasi dengan identitas global yang lebih kuat. [10]

Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan Indonesia sambil menghadapi kompleksitas politik identitas dan globalisasi. Namun, penelitian ini akan memberikan novelty dengan mengkaji pengaruh politik identitas Pancasila dalam masyarakat Dayak secara lebih mendalam. Penelitian ini akan memberikan novelty dengan mengkaji pengaruh politik identitas Pancasila dalam masyarakat Dayak secara lebih mendalam. Penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya identitas Pancasila dalam mengintegrasikan masyarakat yang berbeda di Indonesia, tetapi belum secara spesifik mengkaji pengaruhnya dalam masyarakat Dayak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana identitas Pancasila mempengaruhi masyarakat Dayak dan bagaimana masyarakat Dayak beradaptasi dengan identitas ini dalam konteks politik dan sosial di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana identitas Pancasila mempengaruhi masyarakat Dayak dan bagaimana masyarakat Dayak beradaptasi dengan identitas ini dalam konteks politik dan sosial di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan lembaga-lembaga sosial dalam merancang program yang lebih efektif untuk mengintegrasikan masyarakat yang berbeda di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam memahami bagaimana identitas Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk mengintegrasikan masyarakat yang berbeda di Indonesia.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **Suku Dayak**

Masyarakat Dayak di Kalimantan merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia dengan kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Dalam beberapa dekade terakhir, isu politik identitas di Indonesia semakin marak, termasuk di kalangan masyarakat Dayak. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan identitas etnis dan agama dalam politik, baik dalam kampanye pemilihan umum maupun dalam isu-isu sosial lainnya. [11]

Suku Dayak adalah sebutan umum bagi berbagai kelompok etnis yang mendiami Pulau Kalimantan dengan kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Mereka terdiri dari lebih dari 400 sub-etnis, dengan bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Suku Dayak umumnya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, meskipun ada juga yang memeluk agama Islam,

Kristen, dan Katolik. Terkenal dengan keterampilan seni ukir, anyaman, tenun, berburu, memancing, dan tradisi tato yang unik, Suku Dayak memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan. Rumah adat mereka yang terkenal adalah rumah panjang, yang dapat menampung puluhan keluarga. Memahami Suku Dayak berarti menyelami keragaman budaya dan tradisi mereka, menghormati setiap sub-etnis dengan budayanya yang unik, dan menghargai peran penting mereka dalam menjaga kelestarian alam Kalimantan.[12]

### **Pancasila**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima nilai fundamental: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 oleh para pendiri bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Lebih dari sekadar dasar negara, Pancasila juga merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai dasar dan cita-cita bangsa yang ingin diwujudkan, menjadi pemersatu bangsa yang majemuk, dan menjadi landasan bagi pembangunan nasional. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan budaya bangsa, dan membangun bangsa Indonesia yang adil dan makmur adalah beberapa cara untuk mengaktualisasikan Pancasila.[13]

### **Politik Identitas**

Politik identitas adalah penggunaan identitas kelompok, seperti etnis, agama, ras, atau gender, untuk tujuan politik. Politik identitas dapat digunakan untuk memperkuat solidaritas kelompok, memajukan kepentingan kelompok, atau untuk mempromosikan ideologi tertentu. Politik identitas dapat memiliki dampak positif dan negatif, tergantung pada bagaimana ia digunakan.[14]

#### **Dampak Positif Politik Identitas**

- a. **Memperkuat Solidaritas Kelompok:** Politik identitas dapat membantu memperkuat solidaritas kelompok dengan menyatukan anggota kelompok berdasarkan identitas bersama. Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa belonging dan memberdayakan anggota kelompok untuk bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama.
- b. **Memajukan Kepentingan Kelompok:** Politik identitas dapat digunakan untuk memajukan kepentingan kelompok dengan menyuarakan kebutuhan dan aspirasi anggota kelompok kepada pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan akses kelompok terhadap sumber daya dan peluang.
- c. **Mempromosikan Ideologi Tertentu:** Politik identitas dapat digunakan untuk mempromosikan ideologi tertentu dengan menggunakan identitas kelompok sebagai alat untuk menyebarkan pesan dan menarik dukungan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang ideologi dan memobilisasi dukungan untuk tujuan tertentu.

#### **Dampak Negatif Politik Identitas**

- a. **Memicu Perpecahan:** Politik identitas dapat memicu perpecahan di masyarakat dengan mempromosikan segregasi dan diskriminasi berdasarkan identitas kelompok. Hal ini dapat mengarah pada konflik dan kekerasan antar kelompok.
- b. **Menghalangi Dialog dan Konsensus:** Politik identitas dapat menghalangi dialog dan konsensus dengan memprioritaskan kepentingan kelompok di atas kepentingan bersama. Hal ini dapat membuat sulit untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah-masalah yang kompleks.
- c. **Memperkuat Stereotip:** Politik identitas dapat memperkuat stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok tersebut.

#### **Pentingnya Memahami Politik Identitas**

Memahami politik identitas penting untuk:

- a. **Menavigasi Lanskap Politik yang Kompleks:** Politik identitas memainkan peran penting dalam politik di banyak negara di dunia. Memahaminya dapat membantu kita untuk memahami dinamika politik dan membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana terlibat dalam proses politik.
- b. **Mempromosikan Toleransi dan Inklusi:** Memahami politik identitas dapat membantu kita untuk mempromosikan toleransi dan inklusi dengan menghargai keragaman dan melawan diskriminasi.
- c. **Membangun Masyarakat yang Lebih Adil dan Setara:** Memahami politik identitas dapat membantu kita untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara dengan mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang didasarkan pada identitas kelompok.

Politik identitas adalah alat yang kuat yang dapat digunakan untuk tujuan positif dan negatif. Memahaminya sangat penting untuk menavigasi lanskap politik yang kompleks, mempromosikan toleransi dan inklusi, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

### **3. METODE**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi dan analisis kontekstual untuk mengetahui bagaimana identitas Pancasila mempengaruhi masyarakat Dayak dalam konteks politik dan sosial.[15] Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana identitas Pancasila mempengaruhi masyarakat Dayak dan bagaimana masyarakat Dayak beradaptasi dengan identitas ini dalam konteks politik dan sosial di Indonesia.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia, yang merdeka pada 17 Agustus 1945, adalah sebuah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Proklamasi kemerdekaan yang diumumkan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia ini menandai awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama 77 tahun kemerdekaan, Indonesia telah berkembang menjadi negara dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, di mana kewenangan terbagi antara pemerintah pusat dan daerah. UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa NKRI dibagi menjadi provinsi-provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang, memberikan otonomi tertentu kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.[16]

Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki kewenangan yang terpusat pada pemerintah pusat, namun dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu untuk mengelola wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dari pemerintahan NKRI adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Contoh nyata dari upaya ini adalah program kesejahteraan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk kunjungan kerja ke Papua dan pemberian bantuan sembako. Program-program semacam ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memperhatikan daerah-daerah yang terpencil dan memerlukan perhatian khusus.[17]

Masyarakat Dayak adalah salah satu kelompok suku asli yang menghuni pedalaman Kalimantan. Secara umum, masyarakat Dayak menghuni daerah pedalaman, sementara daerah pesisir dihuni oleh Melayu, Banjar, Bugis, Makassar, Cina, Jawa, Madura, dan suku-suku lainnya. Menariknya, sebagian besar orang Melayu di Kalimantan adalah keturunan suku Dayak yang kemudian memeluk Islam. Identitas Dayak bukanlah sesuatu yang statis; ia bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik dan ekonomi. Isu-isu politik dan ekonomi seringkali menjadi arena perdebatan dan konstruksi identitas Dayak, yang menunjukkan betapa kompleksnya identitas ini dalam konteks ruang dan waktu.[18]

Dalam konteks pemerintahan modern, setiap individu lahir dan hidup di bawah suatu pemerintahan. Pemerintah dianggap perlu untuk kelangsungan peradaban dan kesejahteraan rakyat. Namun, pandangan mengenai peran negara bervariasi. Anarkis sayap kiri seringkali mengkritik negara sebagai alat penindasan, sedangkan libertarian beranggapan bahwa peran negara harus diminimalkan. Meskipun demikian, banyak pemikir abad ke-18 setuju bahwa keberadaan pemerintah diperlukan untuk keuntungan rakyat. Contoh konkret pemerintahan yang baik dapat dilihat pada tindakan Bupati Ketapang di Kalimantan Barat dalam menangani pandemi Covid-19.[19]

Bupati Ketapang, Martin Rantan, mendorong deteksi dini penyebaran virus di desa-desa dan berterima kasih kepada desa-desa yang melakukan blokade untuk mengurangi penyebaran virus. Tindakan ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kebijakan yang efektif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat merupakan cerminan dari pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia, yang terdiri dari lima sila fundamental: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan landasan bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah kristalisasi dari pikiran lokal Nusantara yang bersifat universal, dapat diterima oleh siapa pun kapan pun.[20]

Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang mendasar dalam kehidupan manusia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya menjalankan perintah agama dan menghormati hak beragama setiap individu. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Pandangan ini terbukti secara empiris bahwa setiap pelanggaran terhadap kaidah Tuhan, baik dalam hubungan antar manusia maupun alam, akan menghasilkan konsekuensi yang negatif.[21]

### *Pancasila dalam Dinamika Politik Identitas di Masyarakat Dayak*

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pada kesetaraan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi martabat manusia. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial. Nilai ini mencerminkan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain dan mengindikasikan bahwa perbuatan baik harus didasarkan pada konsep keadilan dan peradaban.[22]

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya semangat kebangsaan dan persatuan dalam keberagaman. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk, demikian pula sikap yang dapat memecah-belah persatuan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.[23]

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menggambarkan sistem demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu hikmat atau kebijaksanaan. Kata hikmat mengandung nilai kebaikan tertinggi yang menjadi landasan dalam mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama.[24]

Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh warga negara. Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan adil. Nilai keadilan dalam sila ini lebih diarahkan pada konteks sosial, memastikan bahwa setiap perbuatan harus sesuai dengan prinsip keadilan bagi masyarakat luas.[25]

Pancasila juga memiliki semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai keberagaman namun tetap bersatu. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai panduan dalam menentukan sikap dan tingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.[26]

Politik identitas adalah konsep yang mengacu pada kepentingan identitas kelompok tertentu. Dalam sistem politik demokratis, politik identitas sering digunakan sebagai strategi untuk meraih kekuasaan dengan cara meyakinkan pemilih bahwa kelompok tersebut paling dapat dipercaya. Di Indonesia, politik identitas seringkali berbasis pada kultur dan tradisi, yang dapat mempengaruhi dinamika politik lokal dan nasional.[27]

Partisipasi politik masyarakat Dayak meningkat setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Kebebasan politik yang baru memberikan kesempatan bagi masyarakat Dayak untuk berorganisasi dan mengejar tujuan politik mereka. Di Kalimantan Barat, masyarakat Dayak menuntut penunjukan pejabat daerah dari kalangan mereka. Ini menunjukkan bagaimana perubahan politik dapat membuka ruang bagi kelompok-kelompok etnis untuk memperjuangkan hak-hak mereka.[28]

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang pada tahun 2024 membawa tantangan bagi Indonesia untuk menghindari penggunaan politik identitas yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Penggunaan politik identitas secara berlebihan dapat merusak persatuan dan perkembangan negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan NKRI.[29]

Selama lebih dari tujuh dekade, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Peristiwa pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menjadi salah satu ujian berat bagi Indonesia. Di tengah keterpurukan sosial dan ekonomi, bangsa Indonesia menunjukkan kekuatan gotong royong dan kebersamaan untuk mengatasi krisis ini. Pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mencapai percepatan pemulihan di semua sektor dan siap menghadapi tantangan global.[30]

Nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, nilai-nilai ini kembali diingatkan sebagai panduan untuk "pulih lebih cepat" dan "bangkit lebih kuat" demi kemajuan Indonesia. Dasar-dasar negara yang kokoh ini menuntun bangsa Indonesia untuk bersama-sama mengatasi setiap rintangan yang ada.[31]

Dalam era modern, banyak masyarakat yang semakin terlibat dalam bidang politik, termasuk masyarakat Dayak. Partisipasi aktif mereka dalam politik menunjukkan bahwa setiap kelompok etnis memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan dan politik lokal.[32]

Selain itu, perkembangan politik di Indonesia tidak lepas dari pengaruh global. Era reformasi pasca-Orde Baru membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik, termasuk di Kalimantan Barat. Politik Dayak yang semakin berkembang menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki peran

## **5. KESIMPULAN**

Indonesia, sebagai negara yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, adalah sebuah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Proklamasi kemerdekaan yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta menjadi tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan pada Pancasila. Identitas nasional yang kompleks dan dinamis ini, terutama dalam masyarakat Dayak, menunjukkan bagaimana kekuatan politik dan ekonomi membentuk identitas suatu kelompok. Pemerintahan Indonesia, baik pusat maupun daerah, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini memiliki kekuatan dalam analisis mendalam tentang sejarah, identitas, dan dinamika politik Indonesia, serta bagaimana Pancasila memainkan peran sentral dalam menjaga persatuan dan kesejahteraan bangsa. Kajian terhadap masyarakat Dayak juga memberikan wawasan tentang bagaimana identitas kelompok dapat berkembang dalam konteks politik dan ekonomi. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada kurangnya data empiris terbaru dan analisis kuantitatif yang dapat mendukung temuan-temuan kualitatif. Selain itu, penelitian ini mungkin kurang memperhitungkan variasi pengalaman di antara kelompok-kelompok lain di Indonesia yang juga berperan dalam dinamika nasional.

## **REFERENSI**

- [1] R. Al Hidayah, B. Maftuh, and E. Malihah, "Relasi Sosial Antar Etnis (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Pontianak)," *Hudan Lin Naas J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–16, 2024.
- [2] A. R. Gumuruh, "Religious Moderation in The Context of Pancasila: A Study of Role and The Impact is Deep Maintaining Social Harmony," *Islam. Insid. J. Keislam. dan Hum.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–19, 2023.
- [3] L. Oktaria, L. N. Simanjuntak, M. Akil, and M. Ali, "Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Wujud Penguatan Identitas Manusia Indonesia," *Civ. Educ. Perspect. J.*, vol. 3, no. 1, pp. 93–103, 2023.
- [4] P. R. Siburian, "PRINSIP KESATUAN PANCASILA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT YANG HARMONIS," *J. Penelit. Pendidik. Indones.*, vol. 1, no. 4, pp. 42–46, 2024.
- [5] S. S. Pancaningsih, Y. Sunesti, and A. Zuber, "Kampung Pancasila: Resolusi Konflik Keagamaan di Kwangrenjejo," *J. Sociol. Agama Indones.*, vol. 5, no. 1, pp. 34–47, 2024.
- [6] A. Supratikno, "Reviewing Identity Politics from Pancasila Democracy," *Proc. First Int. Conf. Democr. Soc. Transform. ICON-DEMOST 2021, Sept. 15, 2021, Semarang, Indones., 2022*, [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:247053499>
- [7] K. Khoirunnisa, "PEMILU DAN POLITIK IDENTITAS: DILEMA ANTARA KEBANGSAAN DAN KEAGAMAAN," *J. Polinter Kaji. Polit. dan Hub. Int.*, vol. 9, no. 1, pp. 36–54, 2023.
- [8] P. S. Widjaja, D. P. A. Wibowo, and I. Geovasky, "Politik Identitas dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila di Ruang Publik," 2021. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:235550313>
- [9] R. H. Nugroho, "PERANAN PANCASILA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM MENANGGULANGI POLITIK IDENTITAS," 2018. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:211459659>
- [10] M. A. Putri and E. A. Meinarno, "RELEVANKAH PANCASILA DAN GLOBALISASI? MENGUNGKAP HUBUNGAN PANCASILA DAN IDENTITAS GLOBAL," *J. Ilm. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2018, [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150268816>
- [11] L. Selvia and S. Sunarso, "Keberagaman Hubungan Budaya Antara Suku Dayak dan Suku Banjar di Kalimantan," *J. Antropol. Isu-Isu Sos. Budaya*, vol. 22, no. 2, pp. 208–216, 2020.
- [12] S. Tripa, *Peradilan Gampong*. Bandar Publishing, 2019.
- [13] W. Nurafifah and D. A. Dewi, "Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," *Cive J. Penelit. Pendidik. Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 4, pp. 98–104, 2021.
- [14] P. J. Burke and J. E. Stets, *Identity theory: Revised and expanded*. Oxford University Press, 2022.
- [15] S. Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.
- [16] S. Marto, "Pengantar otonomi daerah dan desa." Yayasan kita menulis, 2021.

- [17] A. Elcaputera, "Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," *Al Ijarah J. Pemerintah. Dan Polit. Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 22–38, 2021.
- [18] A. Zukifli, F. M. Sari, and P. Prihati, "The Implementation of Forest and Land Fire Management Policy in Indonesia During the COVID-19 Pandemic," *Indones. J. For. Res.*, vol. 9, no. 2, pp. 197–214, 2022.
- [19] N. F. U. Andi, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Merumuskan Program Kebijakan Pembangunan Daerah Di Bappedalitbang Kabupaten Mamasa," *J. Arajang*, vol. 5, no. 1, pp. 76–91, 2022.
- [20] E. Erni and A. Artis, "PANCASILA DAN BUDAYA; Menjadikan Pancasila sebagai Basis Budaya Lokal," *Nusantara; J. Southeast Asian Islam. Stud.*, vol. 20, no. 1, pp. 14–22.
- [21] A. A. Azzahrah and D. A. Dewi, "Toleransi pada warga negara di Indonesia berlandaskan sila Ketuhanan Yang Maha Esa," *Cive J. Penelit. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 6, pp. 173–178, 2021.
- [22] G. F. Michelle, N. A. Sabrina, K. J. Dermawan, M. B. Septivares, and A. Yurisna, "Evaluasi Penggunaan Baliho Sebagai Media Kampanye Dalam Perspektif Sila Kedua Pancasila," *Nusant. J. Pendidikan, Seni, Sains dan Sos. Hum.*, vol. 2, no. 01, 2024.
- [23] R. A. Febrianto, "Mampu Menempatkan Persatuan Dan Kesatuan Serta Kepentingan Bangsa Dan Negara Sebagai Kepentingan Bersama Di Atas Kepentingan Pribadi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Melalui Pendekatan Informatika".
- [24] N. Ulfah, Y. Hidayah, and M. Trihastuti, "Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *J. Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2, pp. 329–346, 2021.
- [25] E. Elviandri, "Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia," *Mimb. Hukum-Fakultas Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 31, no. 2, pp. 252–266, 2019.
- [26] E. D. Indriati, "Storage of functions and values from pancasila in law enforcement as a guideline of life in community," in *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, 2020, pp. 323–327.
- [27] M. Khamdan, *Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa: Kontestasi Dalam Politik Elektoral Di Indonesia*. Penerbit A-Empat, 2022.
- [28] A. Haridison, Yuwanto, L. K. Alfirdaus, and Wijayanto, "The shifting identity of the Dayak in Indonesia," *Asian Aff. An Am. Rev.*, vol. 51, no. 1, pp. 1–27, 2024.
- [29] B. Andhyka, "INTERNALIZATION OF PANCASILA: AN OVERVIEW ECONOMIC AND POLITICAL STABILITY IN AN EFFORT TO STRENGTHEN NATIONAL RESILIENCE," *J. Aktual. Pancasila*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2023.
- [30] A. T. Hoang *et al.*, "Impacts of COVID-19 pandemic on the global energy system and the shift progress to renewable energy: Opportunities, challenges, and policy implications," *Energy Policy*, vol. 154, p. 112322, 2021.
- [31] N. S. Dinarti, D. A. Dewi, and Y. F. Furnamasari, "Meningkatkan Integrasi Nasional melalui Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 5, no. 3, pp. 7890–7899, 2021.
- [32] A. Tsing, "Indigenous voice," in *Indigenous experience today*, Routledge, 2020, pp. 33–67.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).